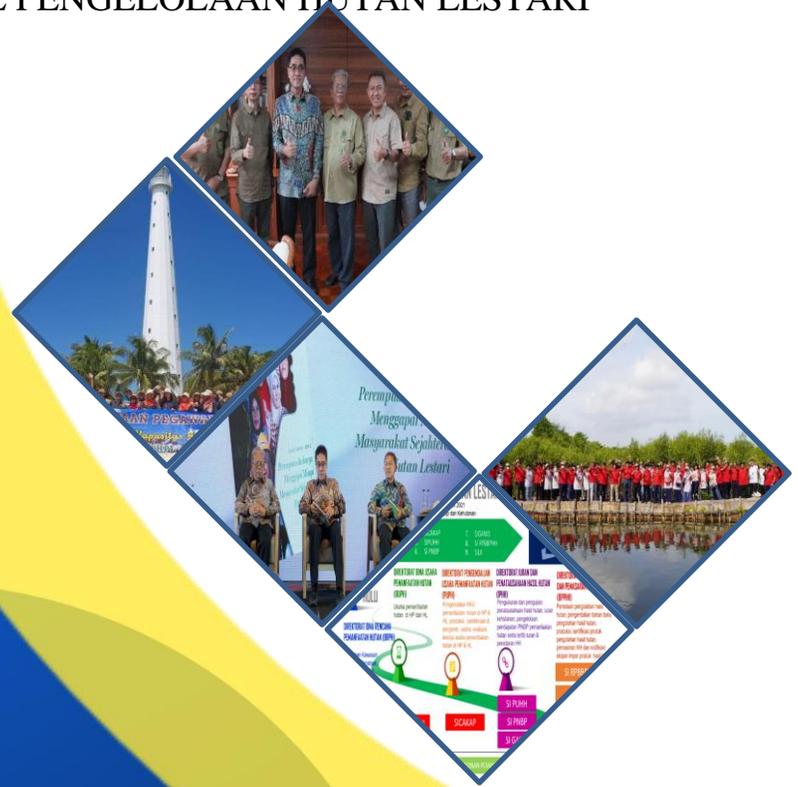




KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

LAPORAN KINERJA



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

2022

KATA PENGANTAR



Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban organisasi atas pelaksanaan penetapan/perjanjian kinerja tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022 merupakan hasil pengukuran kinerja dan sasaran atas pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Hal penting yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari di tahun 2022 yaitu Keberhasilan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari memenangkan KLHK Innovation Award 2022 , dan memenangkan penghargaan Unit Pengolah yang memperoleh nilai pengawasan 93,92 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan), sedangkan sebagai Unit Kearsipan yang memperoleh nilai pengawasan 89,99 dengan kategori A (Memuaskan) , dan menyiapkan perubahan SOTK Ditjen PHPL menjadi Ditjen PHL.

Dalam rangka mendukung meningkatkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan data yang terekonsiliasi dari hulu sampai hilir dan pasar, Ditjen PHL terus mengembangkan Website Data Release Ditjen PHPL yang dibangun sejak bulan September 2017. Website Ditjen PHL saat ini beralamat di **phl.menlhk.go.id** telah bertransformasi menjadi Portal **Satu Data Ditjen PHL** yang dilengkapi dengan Dashboard/Cockpit Indikator Pengelolaan Hutan Lestari.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari 2022 ini, kami sampaikan terima kasih dan semoga bermanfaat.

Jakarta, Januari 2023

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Krisdianto
Krisdianto, S.Hut, M.Sc, P.h.D.
NIP. 19731001 199803 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2022, didapatkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, terealisasi **81,39 (kategori A : Memuaskan)**, dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 100,48%.
 - b. Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, terealisasi **Level 3** dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 100,00%.
 - c. Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel, terealisasi **1 Laporan** dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 100,00%.
2. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2022 sebesar Rp. 59.498.020.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.56.523.856.428,- (95,00%).
3. Efisiensi sumber daya Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari adalah sebesar **0,948** dengan kategori **Efisien**.
4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan data yang terekonsiliasi dari hulu sampai hilir dan pasar, serta mendukung peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan hutan, Ditjen PHL terus mengembangkan Website Data Release Ditjen PHPL yang dibangun sejak bulan September 2017. Website Ditjen PHL yang saat ini beralamat di **phl.menlhk.go.id** telah bertransformasi menjadi Portal Satu Data Ditjen PHL, yang dilengkapi pula dengan Dashboard/Cockpit Indicator Pengelolaan Hutan Lestari. *Dashboard/Cockpit Indicator* .

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
BAB I P E N D A H U L U A N.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Tugas dan Fungsi	7
C. Struktur Organisasi	8
D. <i>Strategic Issue</i> Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022.....	10
E. Sistematika Pelaporan	10
BAB II PERENCANAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024	12
B. Rencana Kerja 2022.....	14
C. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja	16
B. IKK 1 : Nilai SAKIP Ditjen PHL.....	16
C. IKK 2. Level Maturitas SPIP	49
D. IKK. 3 Laporan Keuangan Ditjen PHL.....	50
E. Realisasi Anggaran.....	52
BAB IV PENUTUP	54
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen PHL berdasarkan P.15 Tahun 2021	9
Gambar 2. Visi Ditjen PHL dalam Pengelolaan Hutan	12
Gambar 3. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2022	18
Gambar 4. Bobot Penilaian Komponen SAKIP berdasarkan Permenpan RB 88 tahun 2021	19
Gambar 5. Kegiatan Penguatan SAKIP	20
Gambar 6. Reviu RKAKL Tahun Anggaran 2023	22
Gambar 7. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengelolaan Hutan Lestari	24
Gambar 8. Peserta Bimbingan Teknis Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	25
Gambar 9. Indikator Partisipasi Satker pada Pelaporan SMART DJA	26
Gambar 10. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PHL Tahun 2021	27
Gambar 11. Webinar :Perempuan Bicara FoLu Net Sink.....	28
Gambar 12. Kegiatan Aksi Lestari Bumi di Taman Nasional Kepulauan Seribu.....	29
Gambar 13. Penanaman Mangrove Ditjen PHL di Desa Tanjung Pasir	30
Gambar 14. Peluncuran Buku Penguatan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Lestari.....	30
Gambar 15. Jumlah Permohonan Informasi Publik Ditjen PHL Tahun 2017 s.d. 2022	32
Gambar 16. Buletin PHL Edisi X/2022	33
Gambar 17. Screenshoot video Ditjen PHL Tahun 2022	34
Gambar 18. Bisnis Proses Integrasi Sistem Informasi	36
Gambar 19. Penghargaan KLHK Inovation Award.....	36
Gambar 20. Tahapan Penanganan Perkara pada PTUN.....	39
Gambar 21. Penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2022	48
Gambar 22. Milestone Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHL 2019-2024	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran Pegawai Setditjen PHL	9
Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL Tahun 2020-2024	13
Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Ditjen PHL Tahun 2022	16
Tabel 4. Perbandingan Capaian IKK Ditjen PHL 2020-2024	16
Tabel 5. Perbandingan Nilai SAKIP tahun 2016, 2017, 2018 , 2019, 2020 dan 2021.....	16
Tabel 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 Bidang PHL	38
Tabel 7. Advokasi Hukum yang telah dilaksanakan Ditjen PHL Tahun 2022	39
Tabel 8. Partisipasi Ditjen PHL pada Event Internasional Tahun 2022	40
Tabel 9. Kerjasama Dalam Negeri Ditjen PHL 2022	41
Tabel 10. Neraca Keuangan Ditjen PHL.....	51
Tabel 11. Hasil Pencapaian Penyerapan Anggaran Tahun 2022	52
Tabel 12. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Ditjen PHL	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, diatur bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja disusun oleh setiap entitas (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, dan Bendahara Umum Negara) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja berisi tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN. Sejalan dengan hal tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PANRB tersebut menjelaskan bahwa dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Masing-masing satuan kerja dan unit kerja Eselon II menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani pimpinan unit organisasi (Eselon I) dan pimpinan satuan kerja.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagai salah satu unit kerja Eselon II dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PHL Tahun 2020-2024.

B. Tugas dan Fungsi

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menggantikan Peraturan Menteri P.18 Tahun 2015 , Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas : melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengelolaan hutan lestari;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi dan hubungan masyarakat di bidang Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana dan fasilitasi Reformasi Birokrasi di bidang Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan administrasi kerjasama teknik serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang Pengelolaan Hutan Lestari; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Setditjen PHL terdiri dari 2 (dua) Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

1. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik mempunyai tugas melaksanakan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

2. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

C. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari disajikan pada Gambar 1

Gambar 1. Struktur Organisasi Setditjen PHL berdasarkan P.15 Tahun 2021



1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh pegawai sebanyak 70 orang (PNS sebanyak 62 orang dan PPNPN sebanyak 8 orang), dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai lulusan Sekolah Dasar (SD) hingga lulusan Strata Tiga (S3). Adapun rekapitulasi pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari berdasarkan pendidikan tahun 2022 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Setditjen PHL

No	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
	Sekretariat Direktorat Jenderal PHL	1	15	30	10	13	1	-	70

Sumber : Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (2022)

2. Keuangan

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung anggaran DIPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 59.498.020.000,-.

D. *Strategic Issue* Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022

Berdasarkan kajian bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Ditjen PHL, sejak tahun 2015 Ditjen PHL bertekad bulat menyelamatkan hutan Indonesia dengan mencanangkan titik belok perubahan kebijakan pengelolaan hutan produksi. Sebagai bentuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PHL, Setditjen PHL bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dengan fokus : menyiapkan sumber daya manusia yang lebih kompeten; menyiapkan sarana kerja lebih modern; mengembangkan sistem yang lebih transparan dan akuntabel serta mengembangkan pengawasan dan pengendalian dengan menggunakan teknologi; dan menyiapkan regulasi bidang Pengelolaan Hutan Lestari. Keempat fokus kegiatan tersebut merupakan tantangan yang dihadapi Setditjen PHL untuk tercapainya tujuan organisasi Ditjen PHL secara keseluruhan.

E. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, SDM, Isu Strategis 2022

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar : Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022, Indikator Kinerja Kegiatan

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja (IKK) sesuai Perjanjian Kinerja (PK), berdasarkan hasil pengukuran setiap pernyataan/sasaran, indikator dan target kinerja, baik secara numerik (perbandingan), maupun deskripsi substantif berdasarkan analisis.

- Membandingkan
 - Antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir;
 - Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra;
 - Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/internasional (jika ada);

- Analisis
 - Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - Efisiensi penggunaan sumber daya;
 - Hal-hal yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

4. Bab IV Penutup

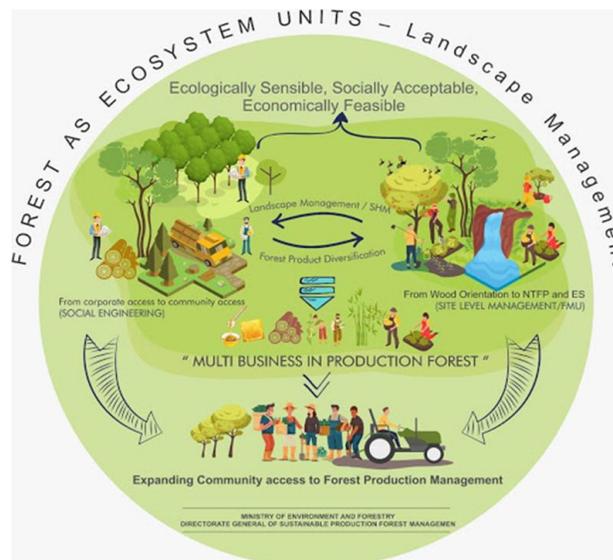
Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Dalam Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Ditjen PHL memiliki visi "Terwujudnya Tata Kelola Hutan yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang Berdaya Saing untuk Meningkatkan Investasi, Produktivitas serta Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat. Visi Ditjen PHL tersebut dapat diilustrasikan sebagaimana Gambar 2.

Gambar 2. Visi Ditjen PHL dalam Pengelolaan Hutan



Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHL di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHL, antara lain: 1). Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan; 2). Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan; 3). Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai didalam Renstra Ditjen PHL 2020-2024 dan dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHL telah menyusun Sasaran Program, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan;
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBK Kehutanan;
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu;
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan;
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan;
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan;
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak;
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHL.

Untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen PHL 2020-2024, Ditjen PHL memiliki Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan" dan Program "Dukungan Manajemen". Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan" merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan misi Ditjen PHL. Program ini dilaksanakan oleh 5 (lima) Direktorat Teknis lingkup Ditjen PHL, Sekretariat Ditjen PHL mendukung pencapaian Sasaran Program Ditjen PHL "**Meningkatnya layanan Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**" dengan Indikator Kinerja Program (IKP): Nilai SAKIP Ditjen PHL, melalui Program "Dukungan Manajemen". Program ini dijabarkan dalam satu kegiatan "Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari". Sasaran Kegiatan yang harus dicapai oleh Sekretariat Ditjen PHL dalam periode tahun 2020-2024 adalah "**Meningkatnya layanan Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**".

Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP Ditjen PHPL	Poin	79	80	81	82	83
Level Maturitas SPIP Ditjen PHPL	Level	3	3	3	4	4
Laporan Keuangan Ditjen PHPL yang Tertib dan Akuntabel	Laporan	1	1	1	1	1

B. Rencana Kerja 2022

Pengelolaan hutan produksi dan lindung dan usaha kehutanan tahun 2020-2024 tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi dari hasil hutan kayu saja, melainkan berkenaan pula dengan keseluruhan sumberdaya hutan lainnya pada hutan produksi di dalam suatu pengelolaan multi bisnis/multi usaha. Tujuan pengelolaan multi bisnis/multi usaha adalah agar dapat diperoleh manfaat yang optimal, baik dari aspek lingkungan, sosial/budaya maupun ekonomi berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024 yang menjadi penentu arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20 tahun berikutnya, sehingga mampu menjamin keberlanjutan pembangunan hutan produksi. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Ditjen PHL tahun 2022 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN sebelumnya dan juga bertujuan untuk meletakkan pondasi pembangunan hutan produksi untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045.

Pendekatan perencanaan yang dilakukan oleh Ditjen PHL dalam menyusun Renja Pembangunan Hutan Produksi dan Hutan Lindung tahun 2022 diselaraskan dengan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 meliputi:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas pembangunan dalam suatu jangka waktu tertentu. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 Secara Nasional mempunyai tema utama "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas";
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir ke dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/Lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah

Ditjen PHL sebagai Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 1 (satu) Prioritas Nasional pada Tahun 2022, yaitu: Prioritas Nasional (PN)

Nomor 1 “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan” dengan Program Prioritas (PP) Nomor 2 “Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi” dan PP Nomor 6 “Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi. Strategi yang dilakukan Ditjen PHL melalui optimalisasi hasil hutan untuk meningkatkan PNPB, tertib peredaran hasil hutan dan legalitas kayu serta peningkatan ekspor produk industri kehutanan.

C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Sekretaris Ditjen PHL dengan Direktur Jenderal PHL sebagaimana Lampiran 1, Sekretaris Ditjen PHL bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program “Dukungan Manajemen” dengan Kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL”. Untuk mengukur keberhasilan setiap pencapaian program dan kegiatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Kinerja Program “Dukungan Manajemen” dapat diketahui berdasarkan capaian IKP Nilai SAKIP Ditjen PHL (81 poin), sedangkan untuk kinerja Kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL” didasarkan atas pencapaian IKK, antara lain:

1. Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (81 Poin);
2. Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (Level 3);
3. Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel (1 Laporan);

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2022 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Sumber Dana Rupiah Murni (RM). Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA-29 Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun Anggaran 2022, sesuai SP Menteri Keuangan Nomor: SP.DIPA-029.03.1.465007/2022 tanggal 17 November 2021, adalah sebesar Rp59.498.020.000,-.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen PHL dengan Dirjen PHL Tahun 2022, Sekretariat Direktorat Jenderal PHL memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana Tabel 3.

Tabel.3 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Ditjen PHL Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	81 Poin
		Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Level 3
		Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	1 Laporan

Tabel 4. Perbandingan Capaian IKK Ditjen PHL 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022		2023	2024
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	79 Poin	79 Poin	80 Poin	80 Poin	81 Poin	81,39 Poin	82 Poin	83 Poin
2	Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Level 3	Level 4	Level 4					
3	Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					

B. IKK 1 : Nilai SAKIP Ditjen PHL

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi tim Inspektorat Jenderal Nomor : SP.72/ITJEN/ITWIL.3/RHS/WAS.3/5/2022 tanggal 17 Mei 2022, secara keseluruhan nilai atas implementasi SAKIP Ditjen PHL adalah sebesar 81,39 poin (Memuaskan), dengan rincian sebagaimana pada Tabel 4

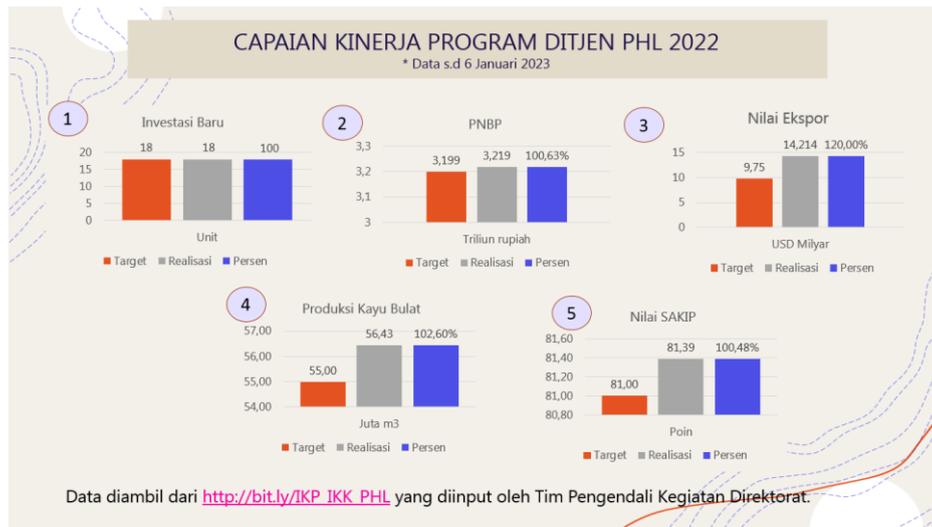
Tabel 4. Perbandingan Nilai SAKIP tahun 2016, 2017, 2018 , 2019, 2020 dan 2021

No.	Komponen	Nilai Maksimum (2016-2020)	Nilai Maksimum (2021)	Nilai					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	30	30	22,5	23,87	24,02	25,01	22,53	23,33
2	Pengukuran Kinerja	25	30	19,41	19,47	20,91	21,36	21,93	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15	15	10,69	11,53	12,78	13,67	12,18	12,30
4	Evaluasi Internal	10	25	4,86	5,17	6,67	8,13	7,61	21,75

5	Pencapaian Kinerja	20	-	13,15	13,15	13,32	10,83	15,75	-
Jumlah Total		100	100	70,61	73,19	77,70	79	80	81,39
Interpretasi				BB	BB	BB	BB	BB	A

Nilai SAKIP Ditjen PHL **meningkat** dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan nilai komponen “Pencapaian Kinerja” Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah beberapa kali melaksanakan evaluasi di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Monitoring dan evaluasi yang intensif terhadap capaian kinerja Ditjen PHL diperlukan, agar walaupun berada pada situasi pandemi Covid-19, capaian kinerja Ditjen PHL tidak mengalami kendala. Capaian kinerja Program Ditjen PHL tahun 2022 seluruhnya telah sesuai/melebihi target kinerja.

Gambar 3. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2022



Evaluasi implementasi SAKIP Ditjen PHL tahun 2021 dilaksanakan oleh tim Inspektorat Wilayah III pada tanggal 31 Maret s.d 11 April 2022, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021.

Melalui Peraturan baru tersebut, terdapat beberapa perubahan desain rancangan evaluasi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pada tahun 2022 target nilai SAKIP Ditjen PHL mulai melangkah ke kriteria yang lebih tinggi, yaitu dengan predikat **“A”** dengan interpretasi **“memuaskan”**.

Dengan segala upaya mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal implementasi SAKIP Ditjen PHL tahun 2021 meraih nilai 81,39 poin dari target sebesar 81 poin, sesuai Laporan Hasil Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal tanggal 17 Mei 2022.

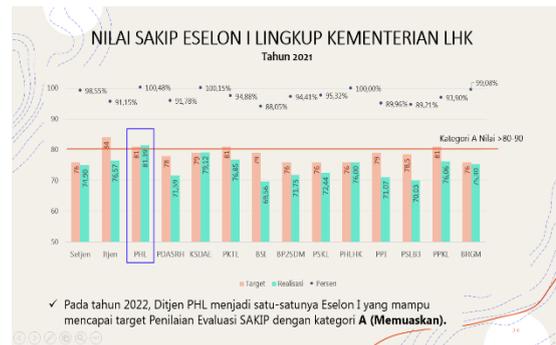
Dalam rangka meningkatkan implementasi SAKIP di lingkup Ditjen PHL, juga telah dilaksanakan kegiatan Penguatan SAKIP melalui Harmonisasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja pada tanggal 2-4 Agustus 2022, yang dilaksanakan di Malang. Kegiatan ini diikuti oleh Kasubbag Tata Usaha

lingkup Ditjen PHL dan Perencana dan Evaluator lingkup Ditjen PHL, dengan mengundang Narasumber dari Inspektorat Wilayah III, KLHK.

B. Penilaian Atas Komponen SAKIP Tahun 2021

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Tahun 2021
1	Perencanaan Kinerja	30	23,33
2	Pengukuran Kinerja	30	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,39
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A
Interpretasi			Memuaskan

17



Gambar 4. Bobot Penilaian Komponen SAKIP berdasarkan Permenpan RB 88 tahun 2021





Gambar 5. Kegiatan Penguatan SAKIP

Dalam rangka mewujudkan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah ditetapkan komponen kegiatan yang disesuaikan dengan dasar penyusunan Rencana Kerja dan RKA-KL tahun 2022, yaitu :

1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, dilaksanakan oleh Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik;
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, dilaksanakan oleh Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik;
3. Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, dilaksanakan oleh Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik;
4. Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, dilaksanakan oleh Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik;
5. Pengelolaan Kepegawaian, dilaksanakan oleh Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
6. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana , dan Reformasi Birokrasi, dilaksanakan oleh Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana ;
7. Pengelolaan Keuangan, dilaksanakan oleh Bagian Keuangan, Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana;
8. Pelayanan Umum dan Perlengkapan, dilaksanakan oleh Bagian Keuangan, Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana;
9. Pelayanan Rumah Tangga, dilaksanakan oleh Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Rincian pelaksanaan kegiatan untuk setiap komponen kegiatan pada Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik diuraikan sebagai berikut :

a. Pembahasan Draft Revisi Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024 Pasca Perubahan SOTK Ditjen PHL

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021, memberikan tambahan tugas dan fungsi pengelolaan hutan lindung dan pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL), hal ini berimplikasi pada perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Ditjen PHL menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL). Perubahan SOTK Ditjen PHL tersebut memberikan konsekuensi atas perubahan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PHL Tahun 2020-2024. Oleh karena itu Direktur Jenderal PHL membentuk Tim Penyusun Revisi Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024 sesuai Surat Keputusan Dirjen PHL Nomor: SK.38/PHL/Set.5/Ren.0/8/2021 tanggal 3 Agustus 2021.

Penyusunan dan pembahasan draft Revisi Rentsra Ditjen PHL Tahun 2020-2024 dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Ditjen PHL dengan Narasumber dari BAPPENAS dan Biro Perencanaan KLHK pada tanggal 18 s.d 20 Agustus 2021 di Bogor dengan mempedomani draft Revisi Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024. Hasil pembahasan penyusunan draft Revisi menghasilkan Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2021.

b. Reviu RKA-KL Pagu Indikatif Ditjen PHL Tahun Anggaran 2023

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dan Rencana Kerja kementerian/Lembaga dalam satu tahun serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Untuk mendorong implementasi anggaran berbasis kinerja (*value for money*) yang merupakan metode penganggaran yang mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan, pada tanggal 27-28 Juli 2022 ditjen PHL memantapkan penelaahan usulan Rencana Kerja 2023 berdasarkan pagu indikatif, dilaksanakan dengan pendampingan dari tim Inspektorat Wilayah III, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Dengan semangat perubahan cara dan budaya kerja, di tengah keterbatasan anggaran APBN, Ditjen PHL tetap berkomitmen mencapai seluruh target yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020 – 2024.

Gambar 6. Reviu RKAKL Tahun Anggaran 2023



c. Penelaahan Pagu Anggaran RKAKL TA 2023

Kegiatan penelaahan ini dilaksanakan secara *on line* menggunakan Aplikasi *teleconference* yang diikuti bersama oleh 3 (tiga) pihak, yaitu Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran), BAPPENAS (Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Biro Perencanaan) Bersama dengan Satker lingkup Ditjen PHL.

d. Penelaahan Pagu Alokasi RKAKL TA 2023

Kegiatan penelaahan ini dilaksanakan menggunakan Aplikasi SAKTI oleh 3 (tiga) pihak, yaitu Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Anggaran), BAPPENAS (Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Biro Perencanaan) Bersama dengan Satker lingkup Ditjen PHL.

e. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2022

Sejalan dengan tata waktu penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2023 dan sinkronisasi visi, misi, kegiatan Ditjen PHL dengan isu-isu strategis, Ditjen PHL akan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Pengelolaan Hutan Lestari, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target kinerja Ditjen PHL, tersusunnya rancangan awal RKP 2023 yang holistik sebagai dasar struktur anggaran pagu Alokasi Ditjen PHL 2023. Rapat Koordinasi Teknis bidang PHL merupakan bagian dari proses perencanaan program dan perencanaan anggaran khususnya dalam tahap awal penyusunan RKP Tahun 2023 Ditjen PHL, dengan memperhatikan target dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Berdasar pada hal-hal tersebut di atas, dibutuhkan pembahasan lebih lanjut mengenai beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Strategi optimalisasi sumber daya manusia (SDM) dan pemenuhan komitmen kinerja dalam menunjang capaian target Renstra dan isu-isu strategis.
2. Perimbangan penetapan target volume kinerja per provinsi berdasarkan skala prioritas.
3. Kebutuhan dan distribusi anggaran per kegiatan, UKE II dan UPT sesuai target kinerja, dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Untuk itu Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengelolaan Hutan dengan Tema "Hutan Lestari dan Berdaya Saing" pada tanggal 26 – 28 Juni 2022 di Surabaya. Beberapa pembahasan rapat koordinasi teknis bidang pengelolaan hutan lestari, antara lain:

1. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan terganggunya rantai logistic khususnya di perairan Laut Hitam Optimalisasi FLEGT License product ke Uni Eropa khususnya fuel wood dan biomass.
2. Fokus Prancis sebagai presidensi EU lebih kepada sektor perdagangan :
 - a. Penerapan global taxation dan global corporate tax.
 - b. Kebijakan Carbon Border Adjustment Mecanism (CBAM) dalam upaya mereduksi competitiveness gap produsen Uni Eropa dengan cara mereapkan CBAM pada produk impor.
 - c. Indonesia mengusulkan joint letter (negara negara produsen komoditas agrikultur terbesar di dunia dari Kawasan Asia, Afrika dan Amerika latin) terhadap European Union Deforestation Regulation (EUDR) atas mandatory due pada supply chain 6 produk pertanian kelapa sawit, kedelai, kayu, kakao, kopi dan daging sapi karena tidak disusun melalui engagement yang transparan dan inklusif bersifat diskriminatif dan tidak akomodatif.
 - d. Disisi lain EUDR tetap wajib menghormati negara mitra yang telah memiliki FLEGT License dan produk kayu dinyatakan telah memenuhi legality requirement.
3. Indonesia-UK Partnership Roadmap 2022-2024 :
 - a. Mempromosikan Kerjasama yang selaras dengan ambisi Indonesia dalam mencapai Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
 - b. Mendukung the New SVLK sebagai wujud Indonesian Certification of Sustainable Forest Management.
 - b. Mempromosikan kemajuan dalam the Forest, Agriculture Commodity, and Trade (FACT) dialogue.
4. Tindak lanjut yang diperlukan dalam mencapai Target Indonesia's FOLU Net Sink 2030:

- a. Rencana kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan kegiatan rutin sektor kehutanan namun dengan peningkatan target yang dilaksanakan dengan lebih terstruktur dan sistematis.
 - b. Indonesia's FOLU Net Sink 2030 mendorong kinerja sektor kehutanan menuju target pembangunan yang sama, yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar 140 juta ton CO₂e pada tahun 2030. Pijakan utama Indonesia's FOLU Net Sink 2030 adalah sustainable forest management, environmental governance dan carbon governance.
 - c. Penyelarasan rencana kerja dan penganggaran Ditjen PHL terhadap pencapaian target Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
5. Ditjen PHL perlu menciptakan terobosan dalam mencetak tenaga teknis (GANIS) unggul, karena dapat berdampak terhadap peningkatan penatausahaan hasil hutan di Indonesia.
 6. Tantangan utama dari PBPH skala kecil adalah ketidaktersediaannya kapasitas masyarakat untuk mengajukan PBPH Skala kecil dengan persyaratan teknis yang serupa dengan PBPH Skala Menengah dan Skala Besar. Oleh karena itu, Ditjen PHL perlu memberikan guidance kepada masyarakat tersebut untuk bergabung., bisa dalam bentuk kelompok masyarakat ataupun bergabung dengan perusahaan/pihak swasta.

Gambar 7. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengelolaan Hutan Lestari





f. Bimbingan Teknis Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Kegiatan yang diikuti seluruh perwakilan unit kerja lingkup Ditjen PHL ini menghadirkan pemateri handal dari:

1. Biro Perencanaan KLHK;
2. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Nasional, Bappenas;
3. Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Direktorat Sistem informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Peserta yang sebagian baru mengenal dunia perencanaan dan penganggaran siap berjuang dan bersinergi dengan para seniornya, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Gambar 8. Peserta Bimbingan Teknis Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)



g. Pelaporan lingkup Ditjen PHL

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PHL dan Ditjen PHL ;
- Penyusunan Laporan Bulanan dan Semester Pelaksanaan Kinerja Anggaran (monev DJA) tahun 2022;
- Penyusunan Laporan Bulanan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (monev Bappenas) tahun 2022;
- Penyusunan Laporan Kegiatan Prioritas Nasional;
- Penyusunan Laporan Rencana Aksi Ditjen PHL;
- Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan;
- Pelaporan online pada aplikasi e-SAKIP yang difasilitasi Oleh Biro Perencanaan;
- Penyusunan Laporan Kegiatan Hibah Luar Negeri;

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja peningkatan pengetahuan/wawasan mengenai pelaporan e-monev DJA dan e-monev Bappenas, khususnya terkait beberapa kebijakan baru integrasi sistem pelaporan; memberi upaya pemecahan masalah terhadap permasalahan yang selama ini sering terjadi pada sistem pelaporan; serta memberi pemahaman pentingnya ketepatan waktu pelaporan dan kualitas pelaporan; diselenggarakan beberapa kali kegiatan Koordinasi Pelaporan. Pelaksanaan kegiatan pelaporan online (monev DJA dan monev Bappenas) oleh satker lingkup Ditjen PHL pada setiap bulan telah sesuai tata waktu pelaporan, seluruh pelaporan online telah diselesaikan sesuai tata waktu pelaporan dan indikator partisipasi satker seluruhnya telah berwarna hijau.

Dalam mendukung kinerja anggaran, Ditjen PHL memperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA) 91,83 (Sangat Baik) pada tahun 2021 dan menempati peringkat 2 di lingkup Kementerian LHK. Nilai NKA dengan kategori Sangat Baik ini tentunya merupakan dukungan semua pihak dalam mendukung kinerja anggaran Ditjen PHL.

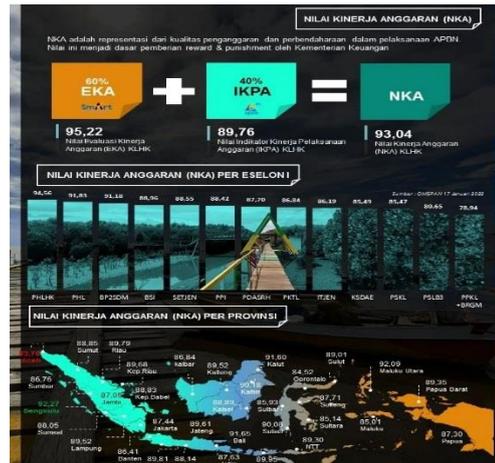
Gambar 9. Indikator Partisipasi Satker pada Pelaporan SMART DJA

No. #	Kode Satuan Kerja #	Satuan Kerja #	Jan #	Feb #	Mar #	Apr #	Mei #	Jun #	Jul #	Ags #	Sep #	Okt #	Nov #	Des #
1	420883	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH IV JAMBANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	420891	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH V PALEMBANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	420902	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VIII PONTIANAK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	420911	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH IX BALIKPAPAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	420927	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XI SAMARINDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	420933	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH II MEDAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	420964	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XIII MAKASSAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	420979	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XIV AMBON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	460007	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	421392	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH I BANDA ACEH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	421300	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III PEKANBARU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	421314	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH X PALANGKARAYA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	421321	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XII PALLU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	421325	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XIV JERAMPURA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	421343	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VI BANDAR LAMPUNG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	421325	BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VII DESPASAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	888812	Balai Pengelolaan Hutan Produktif Wilayah XVI Manokwari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampai 17 dari 17 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 10. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PHL Tahun 2021



h. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Prinsip “No One Left Behind” dalam SDGs (*Sustainable Development Goals* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dimaknai sebagai perjalanan bersama sejumlah negara untuk melanjutkan program pembangunan global yang sebelumnya telah dirintis dalam MDGs (*Millenium Development Goals*/Tujuan Pembangunan Millenium). Salah satu program yang dicetuskan untuk dilanjutkan dalam SDGs adalah dari sektor sumber daya manusia, khususnya pada Kesetaraan Gender (tujuan SDGs kelima).

Hal ini menjadikan setiap negara harus dapat memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan.

Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang Pengelolaan Hutan Lestari, dan untuk menjamin pelaksanaan implementasi PUG dalam setiap kegiatannya, hal ini telah tertuang dalam Renstra Ditjen PHL 2020-2024.

Tujuan Pengarusutamaan Gender pada Ditjen PHL adalah :

- Memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di lingkup Ditjen PHL telah secara adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki;
- Memastikan adanya keberlanjutan, pelestarian, dan pengembangan kualitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
- Memastikan bahwa seluruh jajaran Ditjen PHL memahami konsep, prinsip, dan strategi Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Ditjen PHL.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mempercepat implementasi pengarusutamaan gender di lingkup Ditjen PHL diantaranya :

- Webinar :Perempuan Bicara FoLu Net Sink

Pada tanggal 29 Desember 2022 telah diadakan Webinar :Perempuan Bicara FoLU Net Sink yang diselenggarakan oleh Ditjen PHL bekerjasama dengan MFP4 dengan menghadirkan beberapa pembicara.

Target Indonesia dalam pengurangan emisi karbon dan penguatan tata kelola lingkungan melalui FoLU Net Sink 2030 membutuhkan keterlibatan semua pihak, tidak terkecuali perempuan. Studi MFP4 menunjukkan bahwa perempuan di tingkat tapak memiliki pemahaman kuat dan pengetahuan lokal untuk merawat hutan dan sumber daya alam sebagaimana naluri seorang ibu.

Gambar 11. Webinar :Perempuan Bicara FoLU Net Sink

Perempuan Bicara FoLU Net Sink 2030
Selasa, 29 November 2022
09:00 - 11:00 WIB

Zoom: <https://us02web.zoom.us/j/4715857077>
Narahubung (MFP4): 0878-3228-3635

Keynote Speaker
Dr. Agus Justianto
Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Lestari KLHK

Moderator
Dati Fatimah
GESI Specialist MFP4

Pembicara
Catur Endah Prasetyani, M.T.
Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat KLHK, Perempuan dalam Strategi Pencapaian FoLU Net Sink 2030

Pembicara
Dr. Rina Kristanti, M.Sc.
Aktivis FoLU NET SINK 2030 dan anggota Subpokja Pengarusutamaan Gender Ditjen PHL, Peran dan Tantangan Perempuan dalam Aksi Pengelolaan Hutan Lestari

Pembicara
Mia Sisawati, Ph.D.
Ketua Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia, Strategi Pelibatan Perempuan secara Aktif dalam Ekosistem Pencapaian FoLU Net Sink 2030

Pembicara
Darmi
Ketua HKM Sedyo Rukun D.I Yogyakarta, Perempuan Pemimpin Tata Kelola Hutan Lestari melalui SVLK "Lestari Hutannya, Berdaya Perempuannya"

Pembicara
Tri Yuli Suryaningsih
Kepala Departemen Sertifikasi dan CSR PT. Wijaya Sentosa - Papua Barat, Penggerak Perempuan di Tingkat Tapak dalam Menjaga dan Mengelola Hutan Lestari

- Aksi Lestari Bumi

Subpokja Pengarusutamaan Gender Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dengan penuh semangat melaksanakan kegiatan benchmarking Pengelolaan Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi, ke kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu 8-9 September 2022. Rangkaian kegiatan "Aksi Lestari Bumi" yang turut berperan dalam mendukung FOLU Net Sink 2030 ini, dimulai dari Pengenalan Kawasan TN. Kep. Seribu, Penanaman bibit Mangrove, Pelepasan tukik Penyu Sisik ke laut, Transplantasi Lamun dengan metode TERFs, kunjungan ke lokasi pengolahan sampah Rumah Literasi Hijau dan perbincangan implementasi PUG. Kegiatan menarik ini didukung dengan segenap kehangatan oleh tim SPTN Wilayah III TN. Kep. Seribu, yg dikomandani Bapak Tresna Noviandi.

Gambar 12. Kegiatan Aksi Lestari Bumi di Taman Nasional Kepulauan Seribu



- **Penanaman Mangrove**

Dalam rangka membumikan renops FoLU Net Sink 2030 serta untuk memperingati Hari Ibu, Ditjen PHL melalui Subpokja Pengarusutamaan Gender bersama Dharma Wanita Persatuan, menyelenggarakan "Aksi Lestari Bumi", dengan melakukan penanaman Mangrove di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, Banten (14 Desember 2022).

Kegiatan yang diikuti seluruh pejabat struktural, anggota Dharma Wanita dan tim Subpokja PUG, juga dihadiri oleh expert Gender Ibu Indriastuti dan perwakilan dari Tim Pokja PUG KLHK.

Ekosistem pesisir yang terdiri atas: hutan Mangrove, rawa payau, dan padang lamun, menjadi faktor penting yang diidentifikasi sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Secara alamiah, ekosistem pesisir mampu menyerap karbon dari atmosfer dan lautan lalu menyimpannya dalam bentuk biomassa atau di dalam tanah. Karbon yang tersimpan dalam ekosistem Pesisir tersebut dikenal dengan istilah Blue Carbon. Upaya perlindungan Mangrove sebagai ekosistem Blue Carbon tidak hanya dikaitkan dengan pengurangan emisi dan peningkatan simpanan karbon atau carbon benefit, namun juga pelestarian Mangrove yang sehat akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat

Melalui konsep "*lead by example*" jajaran Ditjen PHL membangun komitmen utk mencapai target Net Sink 2030.

Gambar 13. Penanaman Mangrove Ditjen PHL di Desa Tanjung Pasir



i. Peluncuran Buku Penguatan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Lestari

Pada tanggal 15 Desember 2022 Ditjen PHL mengadakan peluncuran Buku Penguatan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Lestari di Jakarta.

Direktur Jenderal PHL menyampaikan upaya menjaga iklim usaha kehutanan dilakukan melalui perbaikan regulasi, insentif kebijakan, sampai dengan intervensi anggaran dan berbagai kegiatan. Hal ini untuk memberikan dukungan dalam menjaga produktivitas sektor kehutanan secara terpadu baik di hulu, hilir, maupun pasar, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Disamping itu Dirjen PHL menambahkan bahwa sesuai dengan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, paradigma usaha kehutanan akan berubah terkait pengelolaan tingkat tapak dengan tidak hanya mementingkan segi ekonomi.

Gambar 14. Peluncuran Buku Penguatan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Lestari





j. Permohonan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik pada tahun 2022 adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) permohonan diantaranya:

- Permohonan data dan Informasi oleh Sdr. Nurchalis Patty, SS
- Permohonan data dan informasi oleh sdr. Irmansyah
- Permohonan data dan informasi oleh sdr. Achmad Saleh Suhada
- Permohonan data dan informasi oleh sdr. Mufti Fathur Barri
- Permohonan data dan informasi oleh sdr. Abu Meridian
- Permohonan data dan informasi oleh sdr. Adika Ranuh dan Cok Wulan
- Permohonan data dan informasi oleh sdr. Vinton Rasil Taris
- Permohonan data dan informasi oleh sdr. Mangatur Nainggolan
- Permohonan data dan informasi oleh sdr. Muhammad HS

Gambar 15. Jumlah Permohonan Informasi Publik Ditjen PHL Tahun 2017 s.d. 2022



Pada tahun 2022 dari 54 (lima puluh empat) Permohonan informasi terdapat 1 (satu) permohonan yang mengajukan sengketa publik antara Perkumpulan Buah Mandiri Kampung Dayun yang dikuasakan kepada Mangatur Nainggolan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian LHK. Pada tanggal 27 Desember 2022 Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian LHK melakukan sidang di Komisi Informasi Pusat dengan agenda pemeriksaan awal. Permohonan data dan informasi yang disengketakan sebagai berikut :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 17 Februari 1993 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 356/Menhut-II/2004 Tanggal 1 Oktober 2004 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTSII-II/1993 Tanggal 27 Februari 1993
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 327/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 17 February 1993
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 Tentang Perubahan keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 17 February 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper.

- Peta kawasan hak pengusahaan hutan tanaman industri PT. Riau Andalan Pulp and Paper (lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013
- Seluruh dokumen pendukung dari PT. Riau Andalan Pulp and Paper pada saat mengajukan izin HPHTI yang menjadi syarat diberikannya HP

k. Pengelolaan Media Sosial

Penyebarluasan informasi positif Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ditempuh melalui 3 (tiga) akun media sosial yang dikelola oleh Tim Pengelola Web Media Sosial lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yaitu :

- Facebook (*Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari*) sebanyak 280 post/repost Berita dan Video
- Twitter (*@DitjenPHL*) sebanyak 320 tweets/retweets Berita dan Video
- Instagram (*ditjenPHL*) sebanyak 280 post/repost Berita dan Video
- YouTube (*Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari*) sebanyak 9 video

l. Buletin PHL

Penerbitan Buletin Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari bertujuan untuk meningkatkan penyebaran informasi kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menerbitkan Buletin PHL Edisi X Pengelolaan Hutan Lestari sebanyak 1 (kali) dengan judul "Menuju FOLU Net Sink 2030 Pendekatan Integratif Menghadapi Tantangan Perubahan Iklim Global".

Gambar 16. Buletin PHL Edisi X/2022



m. Pembuatan Video

Pembuatan Video kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebanyak 11 (sebelas) video sebagai berikut:

- Multiusaha Kehutanan
- Proses Produksi Plywood
- Proses Produksi Barecore

- Proses Produksi Woodpellet
- Pengolahan Kayu di PBPHH
- Wisata Hutan Bukit Pohen
- Proses Produksi Veneer dengan metode Slicing
- Proses Produksi Furniture
- Podcast: Penguatan Implementasi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)
- Produk Kerajinan Dongkrak Ekonomi Masyarakat Lubuk Bedorong
- Video Profiling Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari

Gambar 17. *Screenshot* video Ditjen PHL Tahun 2022



n. Dashboard Satu Data Ditjen PHL

Pada Tahun 2022, Bagian Program Evaluasi Hukum dan Kerjasama Teknik, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah mengembangkan *Dashboard Management* Dengan *Teknologi Business Intelligence* dan *Data Warehouse* pada *Situation Room* dengan menampilkan data dan informasi dari sistem informasi yang sudah ada lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari. Dengan dibangunnya Dashboard Satu Data PHL dapat Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, sehingga akan menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi yang merupakan pelaksanaan amanat UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta kemudahan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholders* di lapangan, serta mendukung terbangunnya iklim usaha kehutanan yang kondusif dan Mempermudah menganalisa data sehingga pimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang cepat.

o. Integrasi Sistem Informasi

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah menerapkan proses bisnis elektronik/SPBE guna memberikan kemudahan dalam pengelolaan data yang terpusat dan terintegrasi sehingga penggunaan informasi menjadi maksimal serta memberikan pelayanan publik yang cepat dan akurat.

Amanat PerMenLHK Nomor P.45/MenLHK-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Lestari, Ditjen PHL membangun sistem informasi Satu Data Ditjen PHL

melakukan Integrasi sistem informasi guna memberikan Pelayanan publik/masyarakat terkait Pengelolaan Hutan Lestari dari HULU sampai HILIR.

Proses bisnis pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung telah terintegrasi mulai hulu sampai hilir yang diwujudkan melalui SPATIAL PHL, SIRPHJP, DATA PERIZINAN, SICAKAP, SIGANIS, SIPNBP, SIPUHH, SI RPBBPHH dan SILK. Seluruh sistem informasi/aplikasi tersebut diintegrasikan melalui SATU DATA Ditjen PHL sekaligus sebagai Data Warehouse yang dibangun dengan prinsip SATU DATA yaitu Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Referensi Data.

Dengan terintegrasinya sistem informasi pada Ditjen PHL melalui SATU DATA Ditjen PHL maka akan diperoleh data yang akurat, transparan, dan pengelolaan informasi serta dokumentasi yang difokuskan terhadap analisis data untuk pengambilan keputusan strategis, perencanaan anggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan serta pelayanan informasi publik yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik dalam mendukung kebijakan pemerintah dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel sebagai bentuk Good Governance. Masyarakat dapat mengakses data informasi pengelolaan hutan lestari pada website SATU DATA DITJEN PHL melalui <https://phl.mennlhk.go.id>.

Gambar 18. Bisnis Proses Integrasi Sistem Informasi

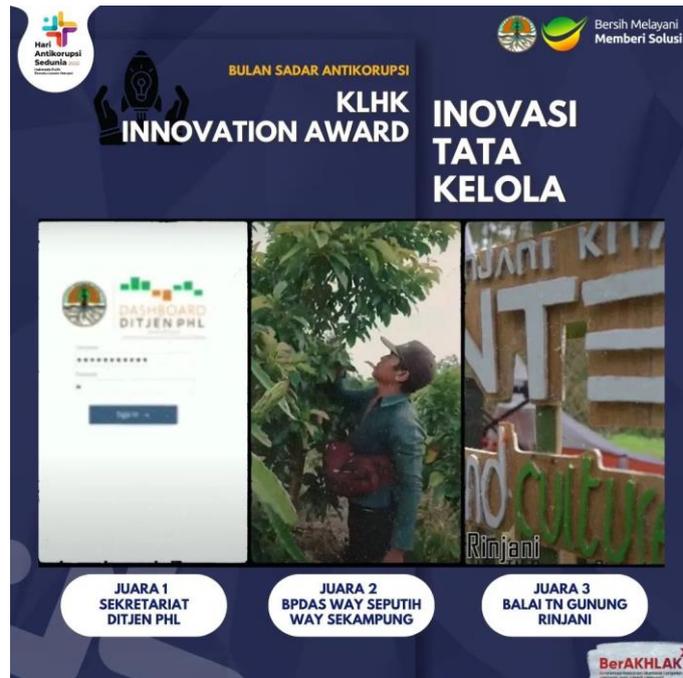


p. Penghargaan KLHK Innovation Award Tahun 2022

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mendapatkan Juara I dalam Kompetisi KLHK Innovation Award Tahun 2022 Kategori Inovasi Tata Kelola "Integrasi Satu Data PHL" yang diadakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Gambar 19. Penghargaan KLHK Innovation Award





q. **Pembahasan dan Penyusunan Konsep Peraturan/Ketentuan Hukum Bidang Pengelolaan Hutan Lestari**

Peraturan perundang-undangan bidang Pengelolaan Hutan Lestari merupakan landasan bertindak untuk pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari negara berdasarkan hukum (*recht staat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*macht staat*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sumber hukum dalam pelaksanaan pengelolaan hutan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan yang kemudian dijabarkan dalam beberapa Peraturan Pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dimana di dalamnya terdapat beberapa pasal yang dalam pelaksanaannya mengamanatkan untuk dibuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Sebagai tindak lanjut, telah diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur bidang Pengelolaan Hutan Lestari antara lain bidang perizinan, perencanaan pemanfaatan hutan, penatausahaan hasil hutan, penatausahaan iuran hasil hutan, dan industri primer hasil hutan.

Guna menyusun peraturan tersebut di atas perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi dari pihak-pihak terkait serta pembahasan draft agar peraturan yang akan dibuat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan dari disusunnya peraturan tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah: Melaksanakan pembahasan-pembahasan untuk menyusun konsep peraturan/ketentuan hukum bidang Pengelolaan Hutan Lestari.

Tabel 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 Bidang PHL

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal
1.	Peraturan Menteri LHK No. 16 Tahun 2022	01-04-2022	Organisasi dan tata Laksana Balai Pengelolaan Hutan Lestari
2.	Peraturan Menteri LHK No. 11 Tahun 2022	02-10-2022	Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan

r. Bantuan Hukum dan Perdata Bidang Pengelolaan Hutan Lestari

Pemberian bantuan/advokasi hukum kepada pejabat/pegawai/lembaga lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang digugat/diuji dalam Perkara Perdata, Tata Usaha Negara, dan/atau Hak Uji Material Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dengan menghadiri persidangan-persidangan perkara perdata/TUN/HUM, baik di dalam kota Jakarta maupun di daerah, diantaranya :

- Membahas, menyusun dan menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses/tahapan-tahapan persidangan (jawaban gugatan, duplik, penyampaian bukt-bukti surat, kesimpulan, memori banding, memori kasasi, memori kontra banding, memori kontra kasasi, menghadirkan saksi-saksi);
- Memberikan pertimbangan hukum/pendapat hukum atas permasalahan bidang Pengelolaan Hutan Lestari.

Terkait pemberian bantuan/advokasi hukum, pada tahun 2022, telah diberikan pelayanan advokasi hukum dalam beberapa perkara, antara lain :

Tabel 7. Advokasi Hukum yang telah dilaksanakan Ditjen PHL Tahun 2022

No	No. Register Perkara dan Tanggal Gugatan	Nama Penggugat	Objek Gugatan	Status	Nilai Gugatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	103/G/2021/PTUN-JKT Tanggal 19 April 2021	ASOHAPEKA	Surat Dirjen PHPL No. S.29/PHPL/IPHH/HPL.4/I/2021 tgl 21 Januari 2021	Kontra PK	-	PTUN Jkt: Menang PTTUN Jkt: Menang MA: Menang MA: Proses
2.	42/G/LH/2021/PTUN.PBR Tanggal 30 Juli 2021	H. Samsari, A.S.	SK Menlhk No. SK.6024/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tgl 28 Juni 2019	PK	Rp. 20.900.000.000,- Rp. 2.000.000.000,-	PTUN Pbr: Kalah PTTUN Mdn: Kalah MA: Kalah MA: Proses
3.	62/Pdt.G/2021/PN.Sak Tanggal 14 Desember 2021	Jadin Bin Tobang Ahmad Bin Tobang	SK IUPHHK-HTI PT. Seraya Sumber Lestari & PT. RAPP	Banding	-	PN Siak: Menang PT Pbr: Proses
4.	239/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 14 Oktober 2021	PT. Sinar Kalbar Raya	SK Menlhk No. SK.75/Menlhk/Set-jen/PHPL.0/3/2021 Tanggal 10 Maret 2021	Kasasi	-	PTUN Jkt: Kalah PTTUN Jkt: Menang MA: Proses
5.	215/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 6 September 2021	PT. Ceria Karya Pranawa	SK Menlhk No. SK.437/Menlhk/Set-jen/HPL.0/11/2020 Tgl 20 November 2020	Kontra PK	-	PTUN Jkt: Kalah PTTUN Jkt: Menang MA: Menang MA: Proses
6.	262/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 19 November 2021	PT. Sylvaduta Corporation	SK Menlhk No. SK.442/Menlhk/Set-jen/HPL.3/11/2020 Tgl 23 November 2020	PK	-	PTUN Jkt: Kalah PTTUN Jkt: Kalah MA: Menang MA: Menang

Gambar 20. Tahapan Penanganan Perkara pada PTUN



s. Partisipasi pada *Event* Internasional

Dalam rangka mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya tupoksi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL), Pegawai Ditjen PHL ikut berpartisipasi pada beberapa pertemuan bilateral/regional/multilateral/internasional. Hal ini

dilakukan sebagai representasi institusi maupun representasi negara, untuk turut menghadiri *event* internasional dalam rangka memberikan kontribusi yang nyata dalam mengawal kepentingan Indonesia terkait Bidang Pengelolaan Hutan Lestari..

Tabel 8. Partisipasi Ditjen PHL pada *Event* Internasional Tahun 2022

No	Kegiatan	Tempat	Waktu
1	<i>The Twenty-First Asia-Pacific Economic Cooperation Expert Group on Illegal Logging and Associated Trade (APEC-EGILAT21) Meeting</i>	<i>Online</i> (Terpusat di Bogor, Indonesia) dan <i>Offline</i> (Terpusat di Chiang Mai, Thailand)	21 – 22 Agustus 2022
2	<i>The Twenty-Ninth Session of the Asia-Pacific Forestry Commission of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO-APFC29)</i>	<i>Online</i> (Terpusat di Jakarta, Indonesia) dan <i>Offline</i> (Terpusat di Ulanbaatar, Mongolia)	22 – 25 Februari 2022
3	<i>The Twenty-Sixth Session of the Asia-Pacific Regional Conference of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO-APRC26)</i>	<i>Online</i> (Terpusat di Jakarta, Indonesia) dan <i>Offline</i> (Terpusat di Dhaka, Bangladesh)	08 – 11 Maret 2022
4	<i>The Fifteenth Session of the World Forestry Congress (XV WFC)</i>	<i>Offline</i> (Terpusat di Seoul, Korea Selatan)	02 – 06 Mei 2022
5	<i>The Seventeenth Session of the United Nations Forum on Forests (UNFF17)</i>	<i>Offline</i> (Terpusat di New York, Amerika Serikat)	09 – 13 Mei 2022
6	<i>Webinar on the Development of a New Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Peatland Management Strategy 2022-2030</i>	<i>Online</i> (Terpusat di Jakarta, Indonesia)	13 Mei 2022
7	Stockholm+50	<i>Offline</i> (Terpusat di Stockholm, Swedia)	31 Mei – 03 Juni 2022
8	Rapat Koordinasi Penetapan Usulan <i>Priority Economic Deliverables</i> (PED) pada <i>Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Chairmanship</i> Tahun 2023	<i>Offline</i> (Terpusat di Jakarta, Indonesia)	30 Juni 2022
9	<i>Indonesia-United Kingdom Forest Law Enforcement, Governance, and Trade – Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) First Joint Implementation Committee (JIC)</i>	<i>Offline</i> (Terpusat di Jakarta, Indonesia)	13 Juli 2022
10	<i>The Twenty-Fifth Meeting of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Senior Officials on Forestry (ASOF25)</i>	<i>Online</i> (Terpusat di Jakarta, Indonesia)	28 Juli 2022
11	<i>Indonesia-Japan Forestry Investment Dialogue (FID)</i>	<i>Offline</i> (Terpusat di Tokyo, Kyoto dan Karuizawa, Jepang)	01 - 05 Agustus 2022
12	Indonesia-United States Climate Working Group II Task Force (TFII WG Meeting)	<i>Offline</i> (Terpusat di Jakarta, Indonesia)	03 Agustus 2022
13	<i>The Fifth Asia-Pacific Economic Meeting of Ministers Responsible for Forestry (APEC-MMRF5)</i>	<i>Offline</i> (Terpusat di Chiang Mai, Thailand)	23 – 25 Agustus 2022
14	<i>The Third Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG3)</i>	<i>Offline</i> (Terpusat di Bali, Indonesia)	29 Agustus – 02 September 2022
15	<i>The Launch-event for the FLEGT Research and Policy Forum</i>	<i>Offline</i> (Terpusat di Berlin, Jerman)	22 – 23 September 2022

No	Kegiatan	Tempat	Waktu
16	<i>Policy Forum on Incentivizing Good Forest Governance of FLEGT-VPA Countries through Broader Market Recognition of Timber National System</i>	<i>Online</i> (Terpusat di Jakarta, Indonesia) dan <i>Offline</i> (Terpusat di Freiburg, Jerman)	26-27 September 2022
17	<i>The Twenty-Sixth Session of the Committee on Forestry of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO-COFO26)</i>	<i>Offline</i> (Terpusat di Roma, Italia)	03 – 07 Oktober 2022
18	<i>Technical Workshop to Streamline Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Sustainable Forest Management Reporting with Other Reporting Frameworks</i>	<i>Online</i> (Terpusat di Jakarta, Indonesia)	04 November 2022
19	<i>The Twenty-Seventh Session of the Conference of the Parties – The United Nations Framework Convention on Climate Change (COP27 UNFCCC)</i>	<i>Offline</i> (Terpusat di Sharm El-Sheikh, Mesir)	04 – 18 November 2022
20	<i>The Fifty-Eighth Session of the International Tropical Timber Council and Associates Sessions of the Committees (ITTO-ITTC58)</i>	<i>Offline</i> (Terpusat di Yokohama, Jepang)	07 – 11 November 2022
21	<i>Pembahasan Draft Grant Implementation Agreement (GIA) between the United States of America through USAID and the Government of Indonesia through BPDH relating to the Implementation of Intermediate Result 3.1 Natural Resource Management Improved of the USAID and the Government of Indonesia Bilateral Development Cooperation Framework Number 497-040 to Support Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i>	<i>Offline</i> (Terpusat di Jakarta, Indonesia)	25 November 2022
22	<i>Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue Trade & Market Working Group, and Broader Market Recognition Preparation Meeting</i>	<i>Offline</i> (Terpusat di London, Inggris)	15 – 18 Desember 2022
23	<i>New Zealand Mutlistakeholder Meeting</i>	<i>Offline</i> (Terpusat di Wellington, Selandia Baru)	19 – 22 Desember 2022

t. Kerjasama Dalam Negeri

Kerjasama Dalam Negeri adalah salah satu langkah guna mendukung pencapaian IKU/IKK Ditjen PHL dalam kaitannya dengan anggaran, kemampuan teknis dan teknologi. Kerjasama dalam negeri dilingkup Ditjen PHL sebagai berikut:

Tabel 9. Kerjasama Dalam Negeri Ditjen PHL 2022

No	Mitra/ Es.2	Periode	Judul dan Ruang Lingkup	Progres dan Update
1.	Universitas Brawijaya	(2021-2026)	Judul: Perjanjian Kerjasama Antara Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dengan Universitas Brawijaya Tentang Peningkatan Aneka Produksi Hutan Lestari	- Pada tanggal 28-29 September 2022 telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pemanfaatan Hasil

No	Mitra/ Es.2	Periode	Judul dan Ruang Lingkup	Progres dan Update
			Ruang lingkup: Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama di bidang penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman, industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produksi hasil hutan bukan kayu meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertukaran data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan 2. Optimalisasi pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) 3. Pengembangan Sumber daya manusia 4. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka agroforestry dan multiusaha di kawasan hutan. 	Hutan dari Hutan Negara.
2.	Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan	(2019 – 2024)	Judul: Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan Informasi untuk Meningkatkan Pengawasan Pelaku Usaha Kehutanan Ruang Lingkup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi 2. Peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha kehutanan 3. Peningkatan pengetahuan teknis 4. Sosialisasi dan penyuluhan 	- Beberapa kali telah dilakukan sharing data untuk kepentingan Pengawasan Pelaku Usaha Kehutanan. - Personil PHL dari IPHH juga telah menjadi salah satu narasumber dalam peningkatan kapasitas dalam kaitannya dengan peredaran hasil hutan.

u. Hibah Kerjasama Luar Negeri

Dalam mengisi GAP dan meningkatkan akselerasi mendukung Ditjen PHL untuk pencapaian IKU/IKK Ditjen PHL turut didukung dengan melaksanakan Kerjasama Luar Negeri. Pada tahun 2022, kerjasama luar negeri bidang PHL yang masih berlangsung dan berakhir pada tahun 2022 diantaranya:

1. Hibah Terencana

- **Forest Investment Programme Tahap II (2019-2022)**

Forest Investment Programme (FIP) merupakan salah satu dari program kolaborasi antara multilateral development bank (MDBs) dan negara-negara penyandang dana dalam mendukung upaya negara berkembang untuk mengurangi emisi karbon melalui

pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dan meningkatkan pengelolaan hutan lestari, konservasi hutan dan peningkatan penyimpanan karbon hutan.

Dalam program tahap kedua FIP mengusung project *Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development* (Mendorong Pengelolaan SDA Lestari berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 13/Sekjen/ROKLN/KLN.0/3/2020 tanggal telah ditetapkan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagai *Executing Agency* baru dan Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi sebagai Pelaksana Harian Proyek II *Forest Investment Programme*.

Nilai hibah sebesar USD 17.350.000 dari World Bank dan USD 5.070.000 dari DANIDA terangkum dalam lembaga donor International Bank for Reconstruction and Development dengan Nomor Hibah TF0A2104 dan TF0A2858 dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2022 yang terdistribusi kedalam 13 *Implementing Agency*, yaitu:

- Direktorat BRPH-Ditjen PHL;
- Direktorat RPP-Ditjen PKTL;
- Pusdatin-Setjen KLHK;
- Pusdiklat-Setjen KLHK;
- Direktorat BUPSHA-Ditjen PSKL;
- BPHL Wilayah 2 Medan;
- BPHL Wilayah 3 Pekanbaru;
- BPHL Wilayah 4 Jambi;
- BPHL Wilayah 5 Palembang;
- BPHL Wilayah 7 Denpasar;
- BPHL Wilayah 9 Banjarbaru;
- BPHL Wilayah 11 Samarinda;
- BPHL Wilayah 12 Palu.

Tujuan Proyek untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam desentralisasi pengelolaan hutan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis hutan pada lokasi terpilih 10 (sepuluh) KPH. Adapun lokasi kegiatan proyek tersebut yaitu 1) KPHP Mandailing Natal, Prop. Sumut 2) KPHP Tasik Besar Serkap, Prop. Riau 3) KPHP Limau, Prop. Jambi 4) KPHP Lakitan, Prop. Sumsel 5) KPHL Rinjani Barat, Prop. NTB 6) KPHP Batulanteh, Prop. NTB 7) KPHP Tanah Laut, Prop. Kalsel 8) KPHP Kendilo, Prop. Kaltim 9) KPHP Dampelas Tinombo, Prop. Sulteng 10) KPHP Dolago Tanggulung, Prop. Sulteng.

2. Hibah Langsung Barang dan Jasa

- **ITTO Project (2017-2022)**

ITTO (*International Tropical Timber Organization*) melakukan project kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dengan nama "*Developing supply capacity of wood-based biomass energy through improve enabling condition and efficient utilization of degraded forest lands involving local communities in North Sumatera Province in Indonesia*". Project ITTO ini bertujuan untuk Meningkatkan kontribusi sektor kehutanan pada pasokan energi terbarukan dan pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan pasokan energi biomassa berbasis kayu. Durasi project selama 48 bulan dari 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2021 dan proses administrasi hibah hingga Juni 2022 dengan hibah sebesar USD 487,100.

Project ini merupakan kerjasama ITTO dan ISWA yang bertindak sebagai *Executing Agency* adalah Direktur Usaha Hutan Produksi-Ditjen PHL yang kemudian menjadi Direktorat PUPH.

Output dari proyek ini ada 3 yaitu : 1) Pembangunan pasokan energi kayu yang berkelanjutan dimulai 2) Tenaga kerja yang terampil untuk pembangunan energy biomassa berbasis kayu tersedia 3) Investasi dalam pengembangan industry energy berbasis kayu dipromosikan.

- **FAO Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) (2020-2022)**

Perjanjian Proyek ditandatangani tanggal 24 Mei 2018 di Jakarta sebagaimana Naskah Perjanjian Nomor PGM/MUL/2015-2020/FLEGT oleh FAO Representatif Indonesia dengan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan selaku *Executing Agency* dengan pelaksanaan kegiatan dilakukan pada periode 2019-2021 dengan penyelesaian administrasi hibah (BAST, MPHL BJS) sampai Juni 2022 dengan nilai hibah sebesar USD 2.400.000.

Tujuan Kerjasama ini adalah untuk mendukung proses VPA, menanggulangi pembalakan liar, mendorong perdagangan produk kayu legal dan akhirnya berkontribusi terhadap pengelolaan hutan secara lestari dan penurunan kemiskinan.

Output dari hibah FAO adalah:

- 1) Keberhasilan negosiasi dan/atau pelaksanaan VPA yang berkontribusi pada peningkatan tata kelola sektor kehutanan dan legalitas kayu pada pasar domestik dan internasional.
- 2) Peningkatan kapasitas sektor swasta termasuk UMKM untuk dapat berpartisipasi dalam produksi, pemasaran, dan perdagangan kayu legal.

- 3) Peningkatan pengetahuan pemangku kepentingan nasional mengenai manfaat penebangan legal, persyaratan perdagangan internasional, dan praktik terbaik dalam penerapan penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan di bidang kehutanan.

- **Multistakeholder Forestry Programme Phase IV (MFP 4) (2018-2023)**

Project hibah MFP IV dengan judul *Trade in Legally-Harvested Timber Products and Community Based Forest Management to Reduce The Impacts of Climate Change (Multistakeholder Forestry Programme Phase IV)* adalah buah kerjasama antara Indonesia dan Inggris. Proyek ini berada di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan selaku Executing Agency dan Palladium selaku mitra agency dari Inggris dengan total Hibah GBP 8.798.205 dengan masa periode hibah 2018 sampai dengan 2023.

Output kerjasama hibah MFP 4, yaitu:

A. Pertumbuhan produksi kayu yang legal dan berkelanjutan

Output 1: Pesan dan insentif dikembangkan untuk membangun kepercayaan dan dukungan terhadap kayu FLEGT Indonesia di pasar internasional.

- 1) Mendukung keberhasilan komunikasi dan pemasaran *brand* kayu FLEGT yang disempurnakan.
- 2) Memfasilitasi kolaborasi multi-pihak, yang mengarah pada aksi konkrit untuk meningkatkan penerimaan kayu FLEGT di pasar domestik dan internasional.
- 3) Dukungan untuk menangani risiko Gender, Kesetaraan dan Inklusi Sosial (GESI) dalam sistem kayu dan mengkomunikasikan peran kepemimpinan perempuan dalam SVLK.
- 4) Dukungan yang diberikan untuk mendapatkan pengesahan kayu FLEGT/SVLK oleh pemerintah, sistem dan/atau bisnis di pasar utama internasional.
- 5) Dukungan diberikan untuk pengembangan proses pengadaan barang /jasa di instansi pemerintah Indonesia, berdasarkan komitmen yang mendukung kayu SVLK.

Output 2: Sistem nasional yang disempurnakan, diperluas dan dipercaya dalam mengelola pasokan kayu Indonesia.

- 1) Dukungan yang diberikan untuk memprioritas penguatan sistem SVLK, sebagaimana diatur dalam rencana aksi VPA.
- 2) Mendorong lingkungan pendukung yang lebih baik bagi kelompok hutan masyarakat dan UKM untuk mengadopsi dan mematuhi SVLK

- 3) Dukungan kolaborasi yang efektif dan penguatan kapasitas pemangku kepentingan VPA untuk mendukung 46system dan meningkatnya tata 46system hutan.
- 4) Mendukung kemajuan menuju penyelesaian dan penanganan masalah legalitas kayu melalui mekanisme pengaduan SVLK yang diperkuat.
- 5) Mendukung kemajuan pada pengembangan strategi pembiayaan jangka 46system46 bagi Independent Forest Monitoring.
- 6) Mendukung para pemangku kepentingan agar dapat mengeksplorasi berbagai pilihan pengelolaan hutan lestari dalam konteks peraturan multi-usaha yang baru.

B. Pertumbuhan bisnis kehutanan berbasis masyarakat

Output 3: Inkubasi Usaha Hutan Berbasis Masyarakat (CBFEs) yang memberikan manfaat ekonomi, lingkungan dan 46system bagi masyarakat yang bergantung pada hutan.

- 1) Pembentukan tiga belas (13) kesepakatan untuk 'kemitraan hutan kemasyarakatan' antara Usaha Hutan Berbasis Masyarakat, pendukung pemerintah dan pelaku akses pasar (*Market Access Players*).
- 2) Pembentukan tujuh (7) Rencana Bisnis Usaha Hutan Berbasis Masyarakat.
- 3) Pembentukan tujuh (7) Usaha Hutan Berbasis Masyarakat untuk percontohan atau uji coba.
- 4) Pembentukan enam (6) Usaha Hutan Berbasis Masyarakat untuk peningkatan ke skala komersial (*scale-up*).
- 5) Mendukung rantai nilai yang relevan pada Usaha Hutan Berbasis Masyarakat dengan peran kepemimpinan inklusif bagi perempuan dan anggota masyarakat yang terpinggirkan.

Output 4: Meningkatkan kondisi pendukung yang diperlukan untuk mempertahankan, mempercepat, dan mereplikasi kemitraan hutan masyarakat yang inklusif.

- 1) Mendukung dan memfasilitasi pendukung prioritas yang teridentifikasi dari 46system 46system – termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan KLHK – dan 46system swasta yang diperlukan untuk memfasilitasi pertumbuhan Usaha Hutan Berbasis Masyarakat.
- 2) Memfasilitasi kebijakan, peraturan dan pedoman yang diperlukan untuk mempromosikan Gender, Kesetaraan dan Inklusi Sosial (GESI) dalam 46system kehutanan masyarakat.
- 3) Sistem informasi pasar dibuat, atau 46system yang ada diperkuat untuk memfasilitasi pengembangan usaha kehutanan/agro-forestry.

Rincian pelaksanaan kegiatan untuk setiap komponen kegiatan pada Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana diuraikan sebagai berikut :

a. Pengelolaan dan Penatausahaan BMN

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka tertib pengelolaan dan penatausahaan BMN dan persediaan pada tahun 2022 adalah :

- Melakukan inventarisasi BMN lingkup Setditjen PHL;
- Membuat SK Penunjukan Penanggung Jawab dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan/Kendaraan Dinas Operasional lingkup Setditjen PHL;
- Membuat Berita Acara Serah Terima atas peminjaman BMN yang bergerak;
- Membuat tanda terima pemakaian barang persediaan;
- Melakukan perhitungan fisik (stock opname) barang persediaan;
- Mengajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN untuk 8 (delapan) unit BMN;
- Membuat Laporan BMN Audited Tahun 2021, Laporan BMN Semester I dan II Tahun 2022 Ditjen PHL, Laporan BMN Unaudited Tahun 2022 dan Laporan BMN Semester I dan II tahun 2022 Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal PHL;
- Membuat Laporan Barang Persediaan Tahun 2022 Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal PHL.

b. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022

Pada tahun 2022 telah disusun Laporan Keuangan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited, Semester I Tahun Anggaran 2022 dan Triwulan III Tahun 2022.

c. Penghargaan Kearsipan Internal

Arsip merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah instansi, karena arsip merupakan sumber informasi dalam melakukan kegiatan perencanaan, analisa, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, penilaian, pengendalian dan pertanggungjawaban. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kepentingan Negara melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Pelaksanaan kegiatan penataan arsip di Lingkup Ditjen PHL dilaksanakan melalui tiga cara yaitu pemindahan arsip inaktif dari central file ke record center, pemusnahan arsip yang telah habis masa simpan dan nilai gunanya, dan penyerahan arsip yang bernilai guna sekunder ke ANRI/Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia.

Terkait dengan kegiatan pengawasan kearsipan internal Lingkup KLHK tahun 2022, Tim Pengawas telah menyusun laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI). Berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Nomor

S.1243/ROUM/TUP/SET.2/11/2022 tanggal 25 November 2022, disebutkan bahwa Setditjen PHL sebagai Unit Pengolah yang memperoleh nilai pengawasan 93,92 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan), sedangkan sebagai Unit Kearsipan yang memperoleh nilai pengawasan 89,99 dengan kategori A (Memuaskan).

Gambar 21. Penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2022



d. Pengelolaan Arsip Dinamis Ditjen PHL

Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan atas penciptaan arsip sehingga dapat dikendalikan dan mengurangi biaya penciptaan, pemeliharaan dan penyimpanan arsip di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Hasil dari kegiatan ini adalah Laporan Monitoring Surat Masuk dan Keluar Ditjen PHL Tahun 2022. Untuk surat masuk di lingkup Ditjen PHL berjumlah 6.131 dan untuk surat keluar di lingkup Ditjen PHL berjumlah 4.982 surat.

e. Pengamanan Arsip Ditjen PHL

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan arsip lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang berada di Unit Pusat Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Cimanggis, Depok sebagai bentuk upaya menjaga dan mengamankan informasi dan fisik arsip agar tetap terpelihara dengan baik. Kegiatan ini berupa rapat koordinasi yang melibatkan Ditjen PHL, Biro Umum beserta Arsiparis yang dilakukan sebanyak 2 kali selama tahun 2022.

f. Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Sebagai fungsi administrasi kepegawaian, selama periode tahun 2022 telah diberikan pelayanan administrasi kepegawaian antara lain :

- Kenaikan Pangkat (KP)

Proses usulan kenaikan pangkat dibagi dalam 2 periode (April dan Oktober). Jumlah usulan kenaikan pangkat periode April 2022 sebanyak 63 usulan yang terdiri atas KP otomatis sebanyak 30 dan KP Pilihan 33. Jumlah usulan kenaikan pangkat periode Oktober 2022 sebanyak 48 usulan yang terdiri atas KP otomatis sebanyak 11 usulan, KP pilihan sebanyak 31 usulan dan KP Penyesuaian Ijazah sebanyak 6 usulan.

- Alih Tugas

Proses alih tugas diperuntukkan bagi pegawai lingkup Ditjen PHL yang akan alih tugas atas permintaan sendiri baik alih tugas dalam satu instansi maupun antar instansi. Permohonan alih tugas selama tahun 2022 telah diproses sebanyak 17 usulan.

- Pensiun

Usulan purna tugas / pensiun diperuntukkan bagi pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun (BUP), atas permintaan sendiri / pensiun dini, maupun meninggal dunia. Proses usulan pensiun selama tahun 2022 sebanyak 42 orang pegawai.

- Cuti

Salah satu hak pegawai adalah mendapatkan cuti. Adapun jenis-jenis cuti antara lain :Cuti Tahunan, Cuti Melahirkan, Cuti Sakit, Cuti Alasan Penting, Cuti Besar, dan Cuti diLuar Tanggungan Negara (CLTN). Selama periode tahun 2022 lingkup Ditjen PHL Pusattelah diproses permohonan cuti sebanyak 56 orang pegawai.

C. IKK 2. Level Maturitas SPIP

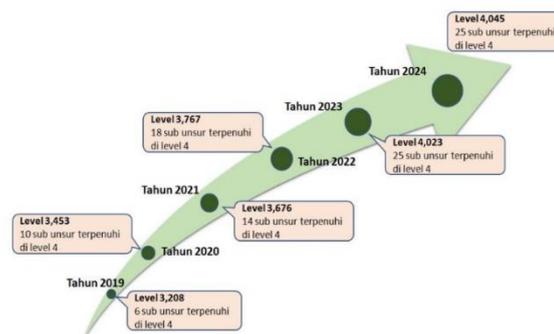
Sistem Pengendalian Intern merupakan proses integral yang dilakukan secara menyeluruh baik itu di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam implementasi SPIP diperlukan adanya suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang dikenal dengan Maturitas SPIP. Dalam Peraturan Kepala BPKP nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa proses penilaian maturitas SPIP berfokus pada 3 (tiga) komponen, yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu Belum ada, Rintisan, Berkembang, Terdefinisi, Terkelola dan Terukur secara optimum. Tingkatan tersebut setara masing-masing dengan level 0 sampai dengan 5, dimana semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

Untuk mendukung target nilai maturitas SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Ditjen PHL juga sudah menetapkan target tahunan sebagai berikut :

Gambar 22. *Milestone* Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHL 2019-2024

Target Nilai Maturitas Ditjen PHPL Tahun 2019 - 2024



Berdasarkan target tersebut, diharapkan pada tahun 2022 Ditjen PHL memperoleh skor maturitas SPIP sebesar **3,767** yang berada pada tingkat "**terdefinisi**".

Pada tanggal 3 Oktober 2022 ditetapkan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP sesuai dengan surat Inspektur Jenderal KLHK nomor S.51/ITJEN/ITWIL1/WAS7/10/2022 tentang Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022. Ditjen PHL memperoleh skor Maturitas SPIP sebesar **3,900** yang berada pada tingkat "**terdefinisi**" dan lebih besar **3,53%** dari target milestone 2022 sebesar **3,767**.

D. IKK. 3 Laporan Keuangan Ditjen PHL

Untuk mencapai konsep *good governance*, diperlukan adanya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara secara tertib dan akuntabel. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas untuk menyusun dan

menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Ditjen PHL sebagai salah satu entitas juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sudah mulai menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pelaporan. Pada tahun 2022 telah disusun Laporan Keuangan Tahunan Periode Tahun Anggaran 2021, Semester I Tahun Anggaran 2022, dan Triwulan III Tahun Anggaran 2022.

Laporan Keuangan Ditjen PHL memberikan kontribusi positif terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-lima kalinya secara berturut-turut. Untuk mempertahankan kualitas Laporan Keuangan agar terus memberikan kontribusi positif, Ditjen PHL melakukan berbagai upaya diantaranya:

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan keuangan melalui berbagai kegiatan E-learning yang diikuti,
- b. Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara melalui Inventarisasi BMN, *Stock opname* barang persediaan, penyusunan RKBMN, pemindahtanganan dan penghapusan BMN.
- c. Konsolidasi Pemutakhiran data SAIBA, SIMAK BMN dan Persediaan sehingga diperoleh data yang sama.

Dengan sejumlah upaya yang dilakukan oleh Ditjen PHL, pada tahun 2022 diharapkan Laporan Keuangan Ditjen PHL dapat memberikan kontribusi positif terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022.

Tabel 10. Neraca Keuangan Ditjen PHL

Uraian	Semester I 2022	Triwulan III 2022	Tahunan 2021 Audited
Aset Lancar	180.183.190.022	249.743.887.065	193.655.446.140
Aset Tetap	14.934.517.621	16.093.938.192	15.973.318.962
Aset Lainnya	1.394.222.435.313	1.394.222.435.313	1.392.807.015.118
Jumlah Asset	1.589.340.142.956	1.660.060.260.570	1.602.435.780.220
Kewajiban Jangka Pendek	14.700.941.752	8.133.858.225	-
Jumlah Kewajiban	14.700.941.752	8.133.858.225	-
Ekuitas	1.574.639.201.204	1.651.926.402.345	1.602.435.780.220

Jumlah Ekuitas	1.574.639.201.204	1.651.926.402.345	1.602.435.780.220
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.589.340.142.956	1.660.060.260.570	1.602.435.780.220

E. Realisasi Anggaran

a. Perhitungan Anggaran

Perhitungan penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan target anggaran tahun 2022. Pada tahun 2022 anggaran DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebesar Rp59.498.020.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp56.523.856.428,- (95,00%). Hasil perhitungan penyerapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2021 disajikan pada Tabel 19.

Tabel 11. Hasil Pencapaian Penyerapan Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)		Capaian (%)
			Pagu	Realisasi	
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktritar Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	59.498.020.000	56.523.856.428	95,00
Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari					
Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel					
	Jumlah/Rata-rata		59.498.020.000	56.523.856.428	95,00

Anggaran yang tidak terserap pada tahun 2022 sebesar Rp2.974.163.572,- (5,00%) yang awalnya akan digunakan untuk belanja pegawai kenaikan tunjangan kinerja.

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya menggambarkan perbandingan/rasio antarcapaian realisasi anggaran (input) dengan capaian kinerja (output). Analisis efisiensi menjelaskan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi terhadap tingkat capaian kinerja dengan jumlah anggaran yang digunakan. Berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja kegiatan Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari sebesar 0,948 (rasio input : output = 95,00% : 100,16%). Hasil perhitungan efisiensi penggunaan sumberdaya disajikan pada Tabel 10.

Tabel 12. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Ditjen PHL

	Target	Realisasi	%
Input	Rp,59.498.020.000-	Rp56.523.856.423,-	95,00
Output	81 Poin	81,39 Poin	100,48
	Level 3	Level 3	100,00
	1 Laporan	1 Laporan	100,00
Nilai Efisiensi			0,948
Kategori			Efisien

BAB IV PENUTUP

1. Kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2022, didapatkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, terealisasi **81,39** (kategori **BB : Memuaskan**), dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 100,00%.
 - b. Level Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, terealisasi **Level 3** dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 100,00%.
 - c. Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang tertib dan akuntabel, terealisasi **1 Laporan** dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 100,00%.
2. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tahun 2021 sebesar Rp59.498.020.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp56.523.856.423,- (95,00%).
3. Efisiensi sumber daya Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari adalah sebesar **0,948** dengan kategori **Efisien**.
4. Upaya untuk meningkatkan Nilai SAKIP yaitu :
 - a. Membangun komitmen pimpinan satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari untuk mencapai target Renstra 2020-2024;
 - b. Menyusun perencanaan lebih matang dengan mempertimbangkan SDM, waktu dan biaya;
 - c. Meningkatkan pencapaian sasaran/kinerja organisasi lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
 - d. Melaksanakan monitoring/pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan;
 - e. Melaksanakan evaluasi secara berkala untuk memantau permasalahan secara dini, sehinggadapat diupayakan pemecahan masalahnya.
5. Upaya untuk meningkatkan Level Maturitas SPIP :
 - a. Mengidentifikasi dengan tepat permasalahan internal baik yang sifatnya signifikan dan tidak signifikan.
 - b. Melaksanakan evaluasi secara berkala untuk memantau permasalahan secara dini, sehingga dapat diupayakan pemecahan masalahnya.
 - c. Meningkatkan dokumentasi terhadap pengendalian intern

LAMPIRAN



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Misran, M.M.

Jabatan : Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Desember 2022

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
NIP. 19630807 198803 1 001

Pihak Pertama,

Ir. Misran, M.M.
NIP. 19621212 199303 1 001

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	81 Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	Level 3
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel	1 Laporan

Kegiatan :
 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
 Tugas Teknis Lainnya
 Ditjen PHL

Anggaran :
 Rp. 59.498.020.000,-

Jakarta, 15 Desember 2022

Direktur Jenderal
 Pengelolaan Hutan Lestari,

Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pengelolaan Hutan Lestari,

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.
 NIP. 19630807 198803 1 001

Ir. Misran, M.M.
 NIP. 19621212 199303 1 001